

## IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH

Oleh:

Okta Novia Sarbiani<sup>1</sup>

Ersi Sisdianto<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,  
Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: [novii121288@gmail.com](mailto:novii121288@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of social responsibility accounting in budget transparency in local governments. Using a qualitative method and desk study approach, this research examines related literature, official documents, and case studies. The results show that social responsibility accounting serves as a tool to measure and report the social impact of budget use, which enables local governments to demonstrate accountability to the public. Budget transparency, on the other hand, increases public trust and encourages public participation in the oversight of the use of public funds. However, implementation challenges still exist, such as limited human resources, lack of information technology infrastructure, and an organizational culture that does not yet support transparency. Therefore, collaborative efforts between central and local governments and support from various parties are needed to create a more transparent and accountable public financial management system. This study provides recommendations for improving human resource capacity, developing information technology infrastructure, and changing organizational culture to support the application of social responsibility accounting principles.*

**Keywords:** *Social Accountability Accounting, Budget Transparency, Public Financial Management, Community Participation.*

# IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam transparansi anggaran pada pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengkaji literatur, dokumen resmi, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban sosial berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dari penggunaan anggaran, yang memungkinkan pemerintah daerah menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat. Transparansi anggaran, di sisi lain, meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik. Namun, tantangan dalam implementasi masih ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, dan budaya organisasi yang belum mendukung transparansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan perubahan budaya organisasi guna mendukung penerapan prinsip-prinsip akuntansi pertanggungjawaban sosial.

**Kata Kunci:** Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial, Transparansi Anggaran, Pengelolaan Keuangan Publik, Partisipasi Masyarakat.

## LATAR BELAKANG

Implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam transparansi anggaran pada pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks ini, akuntansi pertanggungjawaban sosial berfungsi untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran publik tidak hanya berorientasi pada angka-angka, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkan (Abdullah, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat mengenai penggunaan anggaran (Alfani & Nasution, 2022). Dengan demikian, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Pentingnya implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Andhayani et al., 2020).

Ketika masyarakat mengetahui bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efisien dan efektif untuk program-program yang bermanfaat, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan pemerintah (Jatmiko et al., 2020). Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang sering kali menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah (Asmoro, 2019). Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Selanjutnya, penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial juga berkontribusi pada perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip ini cenderung memiliki data yang lebih akurat mengenai kebutuhan masyarakat (Baso, 2022).

Dengan demikian, keputusan anggaran dapat diambil berdasarkan informasi yang valid dan relevan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Namun, tantangan dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dan transparansi anggaran tetap ada (ESNI, 2019). Banyak pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi informasi. Tanpa dukungan yang memadai, sulit bagi mereka untuk menerapkan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel (Hendrawati, Erna, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan prinsip-prinsip ini (Hertati, 2020). Secara keseluruhan, implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam transparansi anggaran pada pemerintah daerah adalah langkah strategis menuju pengelolaan keuangan publik yang lebih baik. Melalui transparansi dan akuntabilitas, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat (Imelda et al., 2021).

# **IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH**

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial**

Akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dampak sosial dari kegiatan organisasi, termasuk dalam konteks pemerintahan daerah (Jering et al., 2020). Sistem ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada bagaimana penggunaan anggaran publik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban sosial menjadi alat penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Karimah, 2022). Melalui sistem ini, pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas mengenai alokasi dan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dapat memahami dampak dari kebijakan yang diambil.

Dalam implementasinya, akuntansi pertanggungjawaban sosial memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang didanai oleh anggaran publik (Kristian et al., 2020). Dengan mengukur dampak sosial dari setiap program, pemerintah dapat menilai apakah anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, laporan yang dihasilkan dari akuntansi ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran di masa mendatang (Mualifu, Ahmad Guspul, 2019). Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Muawanah, 2022).

### **Transparansi Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Publik**

Transparansi anggaran merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan publik yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (Muslimin, 2022). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak, terutama masyarakat, dapat mengakses dan memahami bagaimana dana publik digunakan. Dengan transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah daerah, serta berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran (Ningsih, 2024).

Hal ini penting untuk menciptakan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Aksesibilitas informasi anggaran bagi masyarakat memungkinkan mereka untuk memahami dampak dari penggunaan dana publik terhadap kesejahteraan mereka (Novitasari, 2014). Ketika pemerintah daerah memberikan laporan yang transparan dan terperinci mengenai anggaran, masyarakat dapat melihat secara langsung alokasi dana untuk berbagai program dan proyek yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif terkait kebijakan anggaran, sehingga pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan mereka (Nur & Nagu, 2024).

Namun, meskipun transparansi anggaran sangat penting, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam menyediakan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat (Panggabean, 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam hal pengelolaan informasi anggaran serta membangun budaya transparansi di dalam organisasi pemerintahan. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan transparansi anggaran dapat terwujud secara efektif, sehingga pengelolaan keuangan publik menjadi lebih akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat (Putri Ariella Belinda & [Program, 2021).

### **Hubungan antara Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Transparansi Anggaran**

Hubungan antara akuntansi pertanggungjawaban sosial dan transparansi anggaran sangat erat dan saling mendukung dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Akuntansi pertanggungjawaban sosial berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dari penggunaan anggaran, yang mencakup tidak hanya data finansial tetapi juga informasi tentang manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan implementasi akuntansi yang baik, pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan yang

# **IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH**

akuntabel, yang memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka (Rahma & Rani, 2023).

Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran tidak hanya digunakan secara efisien, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Reinata, 2020). Transparansi anggaran, di sisi lain, merupakan prinsip yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai perencanaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran. Ketika pemerintah menyediakan informasi yang transparan mengenai alokasi dan penggunaan dana publik, masyarakat dapat lebih mudah memahami bagaimana dana tersebut digunakan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka (Sanda, 2022).

Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. (Sayuti, 2020) Oleh karena itu, akuntansi pertanggungjawaban sosial yang efektif akan menghasilkan laporan yang mendukung transparansi anggaran, menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa terlibat dan memiliki hak untuk memberikan masukan serta kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. (Syairozi et al., 2021)

## **Tantangan dalam Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial**

### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang akuntansi sosial. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kekurangan tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan spesifik dalam mengimplementasikan akuntansi pertanggungjawaban sosial. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data yang akurat tentang dampak sosial dari penggunaan anggaran (Panggabea, 2019).

### **2. Teknologi Informasi yang Kurang Memadai**

Layanan teknologi informasi yang tidak cukup memadai juga merupakan tantangan signifikan. Teknologi yang canggih diperlukan untuk mendukung pengolahan data anggaran secara efektif, namun banyak pemerintah daerah yang masih bergantung pada infrastruktur teknologis yang sederhana. Hal ini membuat

sulit bagi mereka untuk menyimpan, mengolah, serta melaporkan data dengan cara yang transparan dan akurat (Putri Ariella Belinda & [Program, 2021).

### 3. Budaya Organisasi yang Belum Mendukung Transparansi

Tidak semua budaya organisasi mendukung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adopsi pola pikir tradisional yang kurang fleksibel, sering kali menjadi hambatan signifikan dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial. Masyarakat sipil dan pegawai publik harus siap untuk berubah dan menerima praktik baru yang lebih transparan dan partisipatif (Rahma & Rani, 2023).

### 4. Solusi Kolaboratif

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta (Reinata, 2020). Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki infrastruktur teknologis, serta mengubah paradigma budaya organisasi untuk lebih mendukung prinsip-transparansi dan akuntabilitas. Melalui kombinasi dari solusi-solusi ini, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem yang efektif dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Sanda, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena akuntansi pertanggungjawaban sosial dan transparansi anggaran dalam konteks pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai perspektif, teori, dan praktik yang relevan dari literatur yang ada. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Buku, artikel jurnal, dan disertasi yang membahas topik akuntansi pertanggungjawaban sosial, transparansi anggaran, dan pengelolaan keuangan publik. Sumber-sumber ini akan memberikan dasar teori yang kuat serta analisis yang komprehensif mengenai isu-isu yang diteliti. Laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan pedoman yang berkaitan dengan akuntansi dan transparansi anggaran di tingkat

# **IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH**

daerah. Dokumen-dokumen ini akan memberikan informasi praktis tentang implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam konteks nyata.

Melakukan pencarian sistematis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian menggunakan database akademis seperti Google Scholar, JSTOR, dan perpustakaan universitas. Peneliti akan mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial dan transparansi anggaran. Menganalisis dokumen resmi pemerintah dan laporan terkait untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik akuntansi pertanggungjawaban sosial diterapkan di berbagai daerah. Analisis ini juga akan mencakup evaluasi terhadap efektivitas transparansi anggaran.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antara konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam transparansi anggaran serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Untuk memastikan validitas data, peneliti akan melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan dokumen resmi. Selain itu, peneliti juga akan mempertimbangkan konteks lokal serta perbedaan budaya dalam analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik mengenai fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial dan transparansi anggaran di pemerintah daerah serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.



*gambar 1.1 konsep pemikiran kualitatif.*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam transparansi anggaran pada pemerintah daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan publik (Sayuti, 2020). Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, ditemukan bahwa akuntansi pertanggungjawaban sosial berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dari penggunaan anggaran, yang memungkinkan pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Laporan-laporan yang dihasilkan dari sistem ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga informasi mengenai manfaat sosial yang dihasilkan dari program-program yang didanai oleh anggaran tersebut (Syairozi et al., 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan utama transparansi anggaran, yaitu memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang bagaimana dana publik digunakan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, transparansi anggaran berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Tegor, Juliza, Yusmalina, 2021). Dengan adanya laporan yang akuntabel dan transparan,

# **IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH**

masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi anggaran yang jelas, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan memberikan masukan terkait kebijakan anggaran (Wahyuningsih, 2018).

Oleh karena itu, hubungan antara akuntansi pertanggungjawaban sosial dan transparansi anggaran sangat erat, di mana keduanya saling mendukung untuk menciptakan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik (Abdullah, 2023). Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dan transparansi anggaran di pemerintah daerah. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang akuntansi sosial, kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip transparansi (Alfani & Nasution, 2022). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta (Andhayani et al., 2020).

Dengan demikian, diharapkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Asmoro, 2019). Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial, serta meningkatkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data anggaran. Selain itu, perubahan budaya organisasi menuju praktik-praktik yang lebih transparan dan akuntabel juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan i

Implementasi prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan publik (Baso, 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dalam transparansi anggaran pada pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini saling terkait dan memiliki peranan penting dalam

pengelolaan keuangan publik. Akuntansi pertanggungjawaban sosial berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dari penggunaan anggaran, yang memungkinkan pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Dengan laporan yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan mereka, serta berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.

Namun, tantangan dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban sosial dan transparansi anggaran masih ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip transparansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel.

### **Saran**

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai terkait akuntansi pertanggungjawaban sosial dan manajemen keuangan publik. Hal ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi.
2. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Investasi dalam teknologi informasi yang memadai sangat penting untuk mendukung pengelolaan data anggaran. Sistem informasi yang baik akan mempermudah pengumpulan, analisis, dan pelaporan data anggaran secara transparan.
3. Perubahan Budaya Organisasi Mendorong perubahan budaya organisasi menuju praktik-praktik yang lebih transparan dan akuntabel sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai transparansi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga Membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Kolaborasi ini dapat membantu

# IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH

menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan mendorong partisipasi masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Y. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo. *Jurnal Al-Buhuts*, 19(2), 427–448.
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara*. 6, 4036–4043.
- Andhayani, A., Malang, P. N., & Artikel, I. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah : e-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(9), 183–193. <https://doi.org/doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005> Informasi
- Asmoro, W. K. (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “ Prodamas ” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri*. 3, 270–277.
- Baso, R. (2022). *YUME : Journal of Management Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang*. 5(3), 83–94.
- ESNI, M. T. (2019). *ANALISIS PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG*. 7(2), 1–11.
- Hendrawati, Erna, M. P. (2020). Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108.
- Hertati, L. (2020). *MODEL PENGARUH ANGGARAN BIAYA ERA COVID-19 TERHADAP INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN*. *Ratri*, 1(2).
- Imelda, M., Abuno, C., Nangoi, G. B., & Gamaliel, H. (2021). *M . I . C . Abuno ., G . B . Nangoi ., H . Gamaliel . EVALUASI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT REMAJA JAYA MOBILINDO MANADO*

*EVALUATION OF THE APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT PT REMAJA JAYA MOBILINDO MANADO Oleh : Jurnal EMBA Vol . 9 No . 4 Oktober 2021 , Hal . 793-800. 9(4), 793–800.*

Jatmiko, B., Akuntansi, P. S., & Yogyakarta, M. (2020). *PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL , AKUNTABILITAS DAN. 0832(September), 231–246.*

Jering, O. A., Ekonomi, F., & Tanjungpura, U. (2020). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI KABUPATEN LANDAK. 10(2).*

Karimah, H. (2022). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI MANAJEMEN KEUANGAN MASJID AGUNG AL BARKAH KOTA BEKASI. Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, 7(1), 1–13.*

Kristian, I., Rahma, A. F., Nugraha, B., Amalia, C., & Barat, J. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif kinerja pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Sosial, 18(3), 11–22.*

Mualifu, Ahmad Guspul, H. (2019). *PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERNITAH DESA DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (STUDI EMPIRIS PADA SELURUH DESA DI KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA) Mualifu,. 1(1), 49–59.*

Muawanah, W. (2022). *ANALISIS PERANAN DAN KONSEP AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA SEKTOR PEMERINTAH DAN SWASTA. 2(1), 10–16.*

Muslimin, K. (2022). *YUME : Journal of Management Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial '. 5(3), 7–12. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.3067>*

Ningsih, D. F. (2024). *Memerangi Kealpaan Karyawan Di Sumatera Utara : Perspektif Akuntansi Syariah Dalam Akuntansi Pertanggungjawaban. 4, 3298–3309.*

Novitasari, A. (2014). *PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( STUDI. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.*

Nur, S. W., & Nagu, N. (2024). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dan Akuntansi Cinta Terhadap Kinerja Manajerial. 6, 37–52.*

Panggabean, F. Y. (2019). *KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*

# IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL DALAM TRANSPARANSI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH

- KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA BERDASARKAN OPINI AUDIT Fitri*. 5(November), 151–159. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>
- Putri Ariella Belinda, N. C., & [Program. (2021). *PENTINGNYA IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAHAN Putri*. 1(1), 58–77.
- Rahma, A. N., & Rani, U. (2023). *Peran E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surakarta*. 39.
- Reinata, N. A. (2020). *PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*. 4.
- Sanda, E. E. K. G. E. M. (2022). *ANALISIS PELAKSANAAN TATA KELOLA RENCANA STRATEGIS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)*. *ACCOUNTING UNIPA*, 1, 20–35.
- Sayuti, S. (2020). *Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)*. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI*, 1(September 2018), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., Yaskun, M., Ekonomi, F., & Islam, U. (2021). *ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE*. 49–59.
- Tegor, Juliza, Yusmalina, F. H. (2021). *PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN KUALITAS APARATUR TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun)*. *JURNAL CAFETARIA*, 2(1), 13–24.
- Wahyuningsih. (2018). *EVALUASI E-BUDGETING DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (TAHUN ANGGARAN 2018)* Wahyuningsih.